



Pemkot Kaji Solusi Korban Blank Spot

YOGYA, TRIBUN - Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, Pemkot Yogyakarta sedang melakukan kajian terkait nasib siswa yang berada di *blank spot*. Ia menyampaikan, ada beberapa kursi kosong di SMPN, namun jumlahnya belum bisa dipastikan.

"Kami, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta minta waktu untuk menghitung dulu, ada berapa yang kosong, cara mengisinya bagaimana, bisa

nggak yang *blank spot* menjadi tempat spesial untuk prioritas. Tapi dasarnya seleksi nilai," ujarnya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/7).

Heroe menambahkan, kajian tersebut termasuk membahas mengenai kemungkinan perpindahan siswa dari sekolah satu ke sekolah yang masih ada sisa kursi.

● ke halaman 19

Pemkot Kaji Solusi

Korban

● Sambungan Hal 13

"Berdasarkan nilai semester berapa, ini sedang dikaji. Lalu perpindahan ke ada aturannya. Akreditasi sekolah harus sama," ucapnya.

Kemunculan *blank spot* dalam sistem zonasi, imbuhnya, sudah diantisipasi pihaknya dengan menerapkan kebijakan bahwa satu siswa boleh memasukkan 16 pilihan sekolah yang ada di kota.

"Kalau tahun ini *blank spot* ada di Umbulharjo. Namun tahun depan bisa berubah lagi. Ini kan karena sebaran lulusan berbeda tiap tahunnya. Kami sedang menginventarisasi masalah yang ada. Jangan sampai terulang di tahun depan," tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana mengatakan, tidak banyak kursi kosong yang tersedia. Ia menegaskan hanya ada dua kursi kosong di SMPN 5 Yogyakarta. "Kursi kosong itu berapa? Masak mau diperebutkan banyak orang," kata Edy.

Hal tersebut dikatakan lantaran orangtua siswa yang gagal diterima sekolah negeri, khususnya korban *blank spot* meminta kursi kosong dimanfaatkan.

"Kalau mau diseleksi pakai pakat NEM, kan sudah lewat. Kemarin kami buka jalur prestasi. Itu kan untuk memfasilitasi yang *blank spot* itu juga. Nah pertanyaannya dimanfaatkan atau tidak?" katanya.

"Kami sudah fasilitasi juga untuk memilih 16 pilihan sekolah, dimanfaatkan atau tidak? Kebanyakan hanya memilih kurang dari 16," tambahnya.

Terkait dengan kursi kosong yang dimanfaatkan untuk mutasi, Edy mengatakan memang memungkinkan. Namun tentu harus

mengikuti peraturan yang sudah ada.

"Kalau mau mutasi, harus sesuai dengan peraturan. Aturannya sudah ada sekolah masih ada, dan dari luar kota. Kalau tidak sesuai aturan ya tidak bisa," ujarnya.

Terkait rencana jangka panjang, pihaknya akan menambah rombongan belajar dan membangun sekolah baru tahun 2019.

Korban zonasi

Dua orangtua siswa mengadukan nasib anaknya yang tidak diterima di SMP Negeri, karena tinggal di area *blank spot* atau daerah yang tidak terakomodasi sistem zonasi yang diberlakukan pada Penyerahan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

Rina Rahmawati, satu di antara orangtua siswa tinggal di Kelurahan Pandeyan RT 10/ RW 12. Ia mengaku telah mendaftarkan anaknya melalui dua jalur, yakni prestasi dan zonasi. Pada jalur prestasi, ia memasukkan pilihan di SMPN 5 dan 8.

"Setelah di prestasi kami gagal, kami *legawa*. Nilai anak saya 26, tapi medali anak saya tidak masuk O2SN. Kalah dengan medali anak-anak yang juga mendaftar di sana," ujarnya. Selasa (17/7).

Selanjutnya, ia mencoba mendaftar di jalur zonasi. Di sana ia menuliskan sembilan pilihan sekolah. Mulai dari SMPN 5, 8, 1, 9, 2, 4, 6, 16, dan 15.

"Kami tidak ambil prestasi 16 sekolah, karena tidak mau terkunci di sekolah yang *nggak* diinginkan. Makanya kami ambil kesempatan tersebut di jalur zonasi," ujarnya.

Ia menambahkan, SMPN 9 menjadi sekolah terdekat dari titik RW tempatnya tinggal. Jaraknya 1,6 km. "Itu kantong teraman saya," ungkapnya.

Namun, ternyata anaknya tidak lolos di satu pun SMPN

yang ia cantumkan dalam pilihan. Hanya hitungan jam posisi anaknya tergeser dengan siswa lain yang memiliki jarak lebih dekat ke sekolah tersebut.

"Ketika saya melihat 16 SMPN sekalipun yang dipilih, setelah saya lihat *breakdown*-nya, lokasi jarak sekolah terdekat adalah 1,6 Km tidak diterima apalagi yang jauh. Ini yang membuat saya merasa ini tidak adil," beber Rina.

Septiana, orangtua lainnya menuturkan, bila saja ada peta sebaran siswa zonasi di tiap SMPN di kota, ia dan orangtua lain pasti akan memaksimalkan pilihan pada jalur prestasi, karena sudah tahu pemetaan di lapangan untuk zonasi tidak memungkinkan pihaknya untuk masuk ke SMPN.

"Saya berperang tapi tidak tahu siapa lawannya. Harusnya sudah ada peta sebaran siswa," tuturnya.

Warga Pandeyan RT 8/ RW 2 tersebut juga mencoba dua jalur, prestasi dan zonasi. Pilihan sekolah untuk prestasi ia memilih SMPN 5 dan 8. Pertimbangannya, ketika ujian menggunakan HOTS otomatis nilai rerata siswa yang diterima tidak setinggi sebelumnya.

"Tidak diterima di prestasi, anak saya ingin mencoba zonasi," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk jalur zonasi, secara pribadi ia sering berkonsultasi dengan pihak SMPN 5. Hal tersebut dikarenakan anak pertamanya bersekolah di SMP tersebut, sehingga ia memiliki relasi di dakamnya.

"Kalau 3 km bagaimana, mereka bilang aman. Memprediksi jarak 3,1 aman, maka kami tunggu saja. Tapi yang tidak dipikirkan adalah anak-anak yang mengambil pilihan 16 sekolah dan menempatkan SMPN 5 di pilihan 9. Jadi mereka (SMPN 5) dapat buangan. Terendahnya 13.00. Ini *nggak* diduga," ucapnya. (kur/er2)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 16 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005